

HUBUNGAN ANTARA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2020

Rosita Alfiansyah Zunaida¹ Mulyo Hendarto Robertus²

^{1,2}Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
razunaida@gmail.com

Abstract

Tujuan: *Labor is one of the indicators used to see the development and economic conditions of a region. Economic growth and the growth of the Labor Force are traditionally considered as one of the positive factors that spur economic growth. Central Java Province is one of the provinces in Indonesia which in 2020 through the 2020 Population Census has a total population of 36,516,035 people, occupying the third position among the provinces in Indonesia with the highest population. With the population increasing every year, the number of unemployed also increases because the labor force cannot be absorbed into the available jobs. The value of labor absorbed in an economic sector can describe the workforce that is included in the labor force that is able to be absorbed by economic sectors. The relationship between GRDP and unemployment is explained through Okun's Law. Okun's law states that for every 2 percent decrease in GRDP related to potential GRDP, the unemployment rate increases by about 1 percent so it can be concluded that the unemployment rate has a negative relationship with GRDP growth.*

Metode: *The method used in this study is panel data regression method using the REM model. The data used in this study is data on the GDP and unemployment of Central Java Province in 2011-2020.*

Hasil: *The result of this research is that the GRDP variable has a positive relationship to the unemployment variable.*

Originalitas: *This is not in line with Okun's Law which explains that the relationship between GRDP and unemployment has a negative relationship. So it can be concluded that Okun's Law cannot be applied in cases in Central Java Province.*

Keywords: *GRDP, unemployment, Okun's Law, Random Effect Model (REM)*

PENDAHULUAN

Pembangunan memiliki tujuan agar daerah-daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu daerah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat (Arsyad, 2010).

Dalam konsep pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang merupakan kondisi yang paling penting atau syarat yang harus diadakan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar,

jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban pembangunan nasional (Tindaon dan Edy Yusuf, 2011).

Tenaga kerja merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi ekonomi suatu daerah. Todaro (2000) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi. Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya modal manusia yang berkualitas, maka kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah juga pada produktivitas dan kreatifitas mereka (Nababan dan Banatul, 2019).

Besarnya nilai tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian dapat menggambarkan tenaga kerja yang termasuk dalam angkatan kerja yang mampu diserap oleh sektor-sektor perekonomian. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian, maka akan diikuti dengan meningkatnya output produksi.

Menurut Keynes, pengangguran dapat diatasi melalui peningkatan permintaan agregat. Meningkatnya permintaan akan mendorong kinerja sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan output. Hal ini akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pemikiran Keynes tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Konsep hubungan ini kemudian secara khusus dikembangkan oleh Arthur Okun pada tahun 1962. Hasil penelitian Okun yang kemudian dikenal dengan konsep Hukum Okun menemukan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Untuk setiap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 2-3% mempengaruhi 1% tingkat pengangguran dan sebaliknya 1% pengangguran dapat mempengaruhi 2-3% pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan GDP (Mankiw, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi. Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah belum optimal.

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun, tingkat PDRB dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Okun, yang mana menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen dan juga sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Okun sebagai alat analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel PDRB dan variabel pengangguran. Dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020. Menggunakan analisis regresi *Generalized Least Square* (GLS) serta data panel. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat hubungan negatif antara PDRB dan pengangguran.

2. Hukum Okun tidak berlaku di wilayah penelitian yaitu Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengangguran sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independent adalah PDRB. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari data pengangguran dan PDRB kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai tahun 2020.

Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM) sebagai model estimasi. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah *Generalized Least Square* (GLS). Pendekatan GLS tidak menggunakan uji asumsi klasik karena sudah dianggap memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan model *Random Effect Model* (REM) dan metode regresi *Generalized Least Square* (GLS). Dengan menggunakan variabel dependen yaitu pengangguran dan variabel independent yaitu PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai tahun 2020.

Tabel 1.
Hasil Regresi

Dependent Variable: PENGANGGURAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/26/22 Time: 21:05
 Sample: 2011 2020
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.000291	6.57E-05	4.435369	0.0000
C	20641.98	2452.221	8.417666	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		12288.04	0.7181
Idiosyncratic random		7699.371	0.2819

Weighted Statistics			
R-squared	0.053559	Mean dependent var	5078.275
Adjusted R-squared	0.050839	S.D. dependent var	7898.708
S.E. of regression	7695.307	Sum squared resid	2.06E+10
F-statistic	19.69329	Durbin-Watson stat	1.117846
Prob(F-statistic)	0.000012		

Unweighted Statistics

R-squared	0.245526	Mean dependent var	26127.96
Sum squared resid	7.09E+10	Durbin-Watson stat	0.325106

Sumber: Data Penelitian, diolah, 2022.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel sebelumnya, maka berikut ini hasil Uji T statistic dari variabel independent yaitu PDRB. Hasil pengujian dengan menggunakan program Eviews diperoleh nilai t statistic PDRB adalah 4.435369 dan probabilitas 0.0000. Sedangkan nilai t-tabel untuk jumlah observasi sebanyak 35 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = $35-2 = 33$ diperoleh 1.692. Sehingga diperoleh bahwa t-statistik lebih besar dari t-tabel atau $4.435369 > 1.692$, dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 5% atau $0.0000 < 0.05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB secara signifikan mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dengan kesimpulan H_0 ditolak dan menerima H_a . Hal ini menyatakan bahwa PDRB memberika pengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kepercayaan 95%.

Kemudian, nilai F-hitung adalah 19.69329 dengan nilai probabilitas 0.000012. Nilai F-tabel untuk jumlah observasi sebanyak 35 dan tingkat signifikansi 5% dan k atau jumlah seluruh variabel baik variabel independent dan dependen adalah 4, maka nilai $N_1 = k-1 = 2-1 = 1$, $N_2 = n-k = 35-2 = 33$ adalah 4.139. Sehingga diperoleh bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel atau $19.69329 > 4.139$ dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 5% atau $0.000012 < 0.05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dengan kesimpulan H_0 ditolak.

Data *R-square* adalah 0.053559 atau 5.35%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dapat menjelaskan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.35% sedangkan sisanya 94.65% dijelaskan oleh factor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Hukum Okun yang mana hubungan antara PDRB dan pengangguran berhubungan negatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap analisis data di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil dari uji parsial (Uji-T), penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara PDRB terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020. Hasil ini mengindikasikan bahwa PDRB dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah.
2. Hukum Okun tidak dapat berlaku pada kasus di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020 karena hasil dari penelitian menunjukkan hubungan positif PDRB terhadap pengangguran. Hal ini tidak sejalan dengan definisi dari Hukum Okun yang menjelaskan bahwa hubungan antara PDRB dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. Gregory. 2019. *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.



- Nababan, Riris Lasti dan Banatul Hayati. 2019. “Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016”. *Diponegoro Journal of Economic Development* Vol.5 No.3 tahun 2019, h. 1-15.
- Tindaon, Ostinasia dan Edy Yusuf. 2011. “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik)”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.